

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 pasal 12 ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Sistem Penagihan Pajak yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut telah menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hal ini dapat dilihat unsur-unsur sistem penagihan pajak sebagai berikut:
 - a. Bagian yang terkait dalam penagihan pajak meliputi: seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta Seksi Penagihan.
 - b. Dokumen yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
3. Implementasi sistem penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut terdapat beberapa prosedur, antara lain: Prosedur Penerbitan Surat Teguran, Prosedur Penerbitan Surat Paksa, Prosedur Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Prosedur

Pelunasan Tunggakan Pajak. Dalam prosedur pelunasan tunggakan pajak, Wajib Pajak akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) atau Nomor Transaksi Bank (NTB) sebagai bukti pengesahan suatu setoran ke kas negara.

4. Pencairan Tunggakan Pajak terbesar dilakukan dengan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dengan jumlah pencairan sebesar Rp 4.693.260.197 bila dibandingkan pencairan dengan Surat Teguran sebesar Rp 3.197.887.557, SPMP sebesar Rp 2.145.754.046, lelang sebesar Rp 869.581.570 dan saldo akhir tunggakan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp 180.751.957.816.
5. Hambatan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut adalah banyak Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya dan minimnya tenaga Jurusita Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan maka akan dikemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi Wajib Pajak dan fiskus pajak khususnya bagian seksi penagihan :

1. Pelaksanaan prosedur penagihan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga tujuan akhir pencapaian tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak tercapai.

2. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada seksi penagihan untuk lebih bekerja keras lagi sehingga pencairan tunggakan pajak dapat meningkat.
3. Bagi Wajib Pajak ketika membayar tunggakan pajak diharapkan memastikan kembali bahwa di bukti setoran pembayaran sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) atau Nomor Transaksi Bank (NTB) karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tersebut sebagai bukti sah pembayaran dan apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan kembali, Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti setoran pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, dan Muhammad F Husain. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: YKPN
- Agus Setiawan, dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Billy Ivan Tansuria. 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- M. Rifqi Wildan. Wawancara Implementasi Penagihan Pajak. Surabaya. KPP Pratama Surabaya Rungkut. 29 Desember 2014
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Marihot P. Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Rusjdi. 2010. *PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Riant Nugroho. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2007. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*
- _____. 2000. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000*